RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL

SUHARNO

HARI SUKSMANTI KURNIA ARTIANINGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR TABEL		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	6
2.1	Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan	6
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	6
2.1.2	Sumber Daya Dinas Perhubungan	10
2.1.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	14
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan	29
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan	30
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	30
2.2.2	Isu Strategis	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN	35
3.1	Tujuan Dinas Perhubungan	35
3.2	Sasaran Dinas Perhubungan	35
3.3	Strategi Dinas Perhubungan	36
3.4	Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	37
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
4.1	Program Dinas Perhubungan	40
4.2	Kegiatan Dinas Perhubungan	40
4.3	Sub Kegiatan Dinas Perhubungan	88
4.4	Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	88
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	90
4.6	Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	90
BAB V	PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan	10
Tabel 2.2	Sarana Prasarana Dinas Perhubungan	11
Tabel 2.3	Fasilitas Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024	15
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026	19
Tabel 2.6	Isu Strategis PD	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030	36
Tabel 3.2	Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran	37
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan	37
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	38
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030	41
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	57
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	88
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	90
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan	91

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Renstra PD	5
Gambar 1.2	Hubungan Renstra dan RPJMD	5
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi	14
Gambar 2.2	Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan	15

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berlaku lima tahun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun RPJMD harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra-PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkesadaran"**

Untuk mencapai tujuan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka Dinas Perhubungan melaksanakan **Misi ke 5 "Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta Menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia"**. Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan rancangan Renstra-PD dapat digambarkan dalam bagan alur gambar 1.1 di bawah ini.

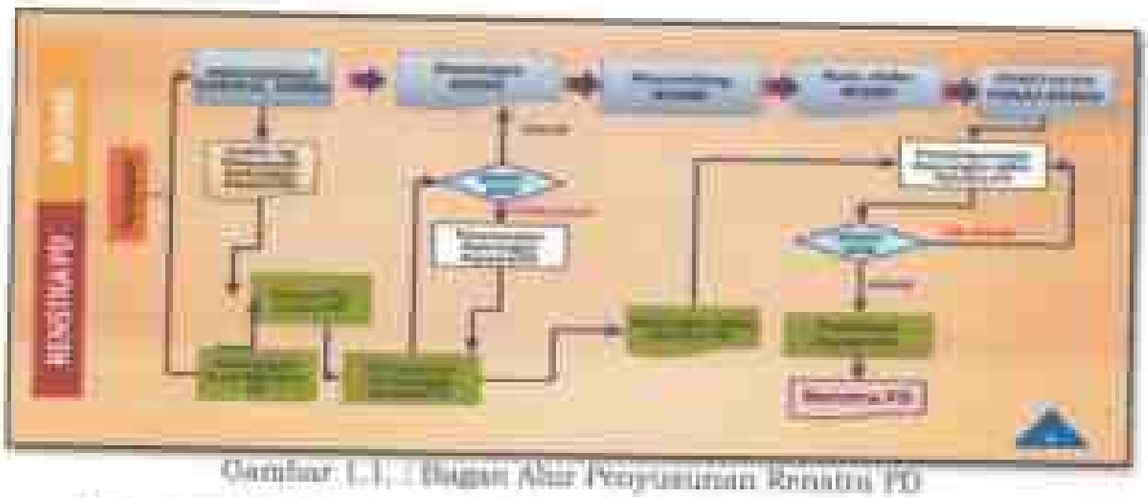

Gambar 1.1 : Bagan Alur Penyusunan Renstra PD

Penyusunan Renstra ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan juga berdasarkan pada kondisi lingkungan serta isu-isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Hubungan antara RPJMD dan Renstra-PD terlihat pada gambar 1.2

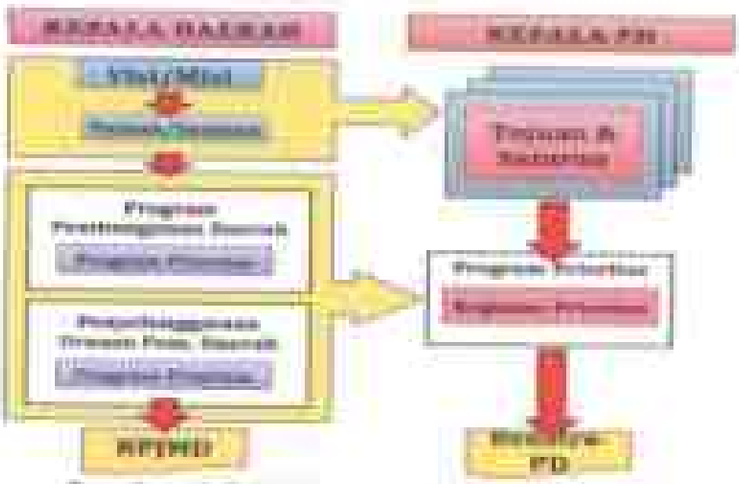

Gambar 1.2 Hubungan Renstra dan RPJMD

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Perhubungan di Kabupaten Gunungkidul sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Perhubungan saat ini dan kondisi yang akan dicapai lima tahun ke depan.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bidang Perhubungan kurun waktu 5 tahun kedepan.
3. Sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Renstra 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
  - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan
  - 2.2.1 Permalahan Pelayanan Dinas Perhubungan
  - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN
- 3.1 Tujuan Dinas Perhubungan
- 3.2 Sasaran Dinas Perhubungan
- 3.3 Strategi Dinas Perhubungan
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program Dinas Perhubungan
- 4.2 Kegiatan Dinas Perhubungan
- 4.3 Sub Kegiatan Dinas Perhubungan
- 4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dibentuk sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, diarahkan sebagai dinas teknis yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan pelaksana tugas-tugas di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
d. Pembangunan,pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas;
e. Pengelolaan terminal, pelabuhan lokal dan perparkiran;
f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan;
g. Pembinaan,pengawasan, dan keselamatan lalu lintas;
h. Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;
i. Pengaturan,penjagaan dan patroli lalu lintas;
j. Pengujian kendaraan bermotor;
k. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern di bidang perhubungan;
l. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perhubungan;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan; dan
n. Pengelolaan UPT.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pembantu Pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari sub bagian-sub bagian, serta unsur pelaksana bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi dan unit pelaksana teknis, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan

9

administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
5. Penyusunan rencana kerjasama;
6. Penyusunan perjanjian kinerja dinas;
7. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
8. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang perhubungangan
9. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perhubunga
10. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
11. Penyusunan laporan kinerja dinas;
12. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas
13. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
14. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
15. Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang Perhubungan;
16. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
17. Pelayanan administratif dan fungsional;
18. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern secretariat;
19. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;dan
20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.

b. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan menajemen dan rekayasa lalu lintas, pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas. Adapun fungsi Bidang Sarana dan Prasarana adalah :

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang Lalu Lintas;
2. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas;
3. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas;
4. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Lalu Lintas;
5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas;
6. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern di bidang lalu lintas;

7. Penyusunan dan penerapan norma,standart,pedoman, dan petunjuk operasional di bidang lalu lintas;dan
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporatan Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Angkutan dan Terminal, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan penumpang dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Fungsi dari Bidang Angkutan dan Terminal adalah :
   1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Angkutan dan Terminal;
   2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Angkutan dan Terminal;
   3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Angkutan dan Terminal;
   4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan penumpang dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
   5. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern di bidang Angkutan danTerminal penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Angkutan dan Terminal; dan
   6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Angkutan dan Terminal.

d. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta pengelolaan perparkiran. Fungsi dari Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran adalah :
   1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum danParparkiran;
   2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
   3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
   4. Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta pengelolaan perparkiran;
   5. Penyelenggaraan sistim pengendalian intern di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
   6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;dan
   7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yaitu :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum.

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
   1) Seksi Pengendalian dan Operasi;
   2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

d. Bidang Angkutan dan Terminal, terdiri dari :
   1) Seksi Angkutan;
   2) Seksi Terminal.

e. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran, terdiri dari :
   1) Seksi Penerangan Jalan Umum;
   2) Seksi Perparkiran.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor, yang membawahi:
   1) Sub bagian Tata Usaha.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan unsur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana digambarkan dengan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1 :

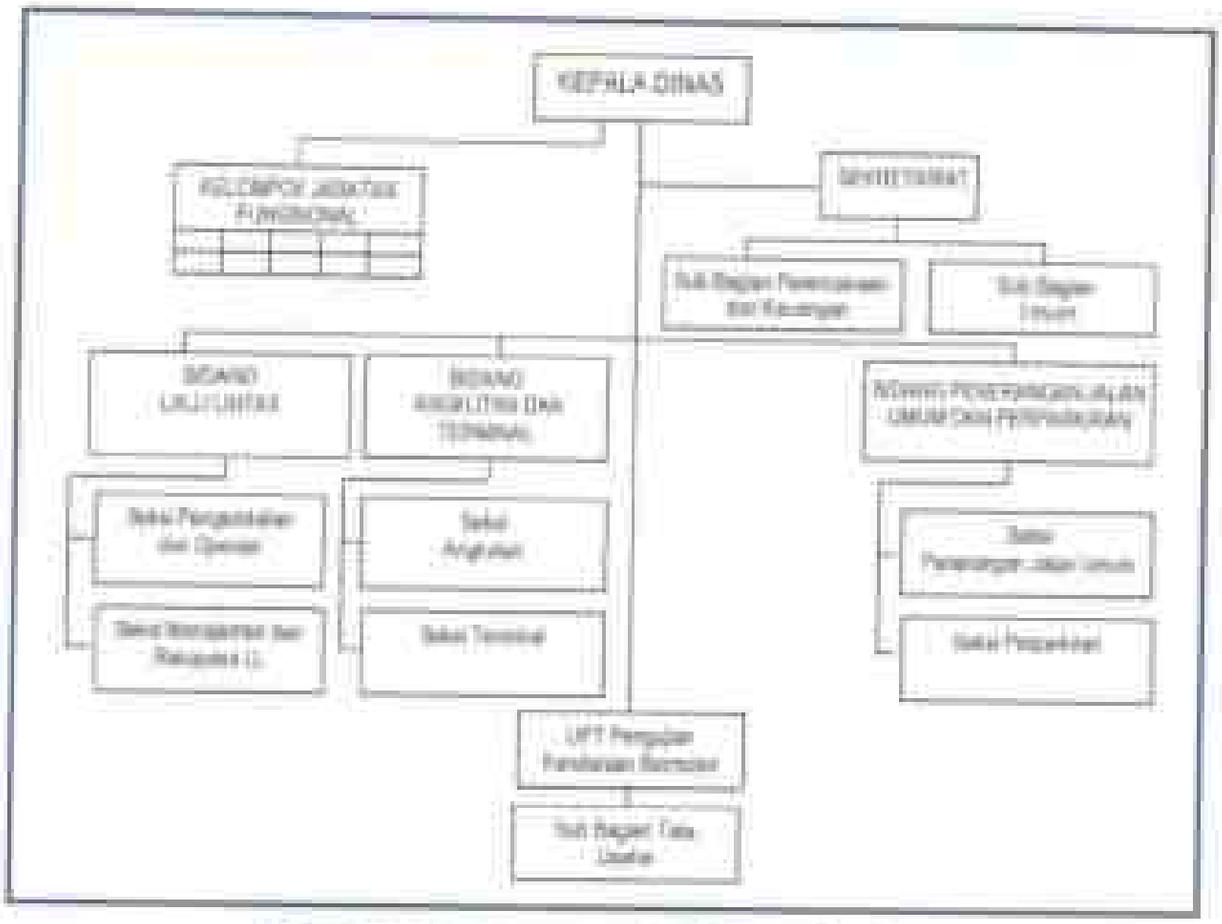

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan disukung dengan sumberdaya. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2024 sebanyak 88 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

No	Jabatan	Formasi							Pegawai yang ada								Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi							Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4						5	6							7	8
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP			
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1					1	1							1	
B.	Jabatan Administrasi																	
I.	1. Administrator	4		4					3	3							3	
	2. Pengawas	10		10					9	3	4	1					3	6
II	3. Pelaksana	75	-	6	56		37		34		4	5	2	11	2		18	16
	4. Non JDP								42		4	3		36			37	5
C.	Jabatan Fungsional	12			11		1		9		2	6	1				7	2
	Jumlah	107		21	67		38		88	6	14	14	3	47	2		72	16

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA 47 orang (53,41%), disusul oleh jenjang pendidikan S1/D4 sebanyak 16 orang (18,18%), D3 sebanyak 14 orang (15,91%), S2 sebanyak 6 orang (6,82%), D2 3 orang (3,41%), SMP 2 orang (2,27%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki (72 orang) dan jumlah pegawai perempuan (16 orang). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, baik untuk jabatan struktural maupun fungsional. Hal ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang lebih banyak dibutuhkan petugas operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Sesuai Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 151/KPTS/2023 tentang Peta Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perhubungan masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 19 orang, terdiri dari 1 orang jabatan administrator, 1 orang jabatan pengawas, 13 orang jabatan pelaksana dan 4 orang jabatan fungsional. Terdapat 5 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pengawas karena belum mengikuti diklatpim IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Di samping sumberdaya manusia, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan sumber daya lainnya berupa sarana/aset pendukung pelaksanaan program

kegiatan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sarana gedung kantor yang saat ini dipakai adalah :

1. Gedung kantor di Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul 55851 Telepon : (0274) 391797, Faksimili: (0274) 394178 Pos-el: dishub@gunungkidulkab.go.id, Laman: dishub.gunungkidulkab.go.id untuk Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-bidang;
2. Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul;
3. Gedung Terminal Tipe C Semin yang berada di Kecamatan Semin.

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program/kegiatan tercatat sebagaimana rekapitulasi aset yang tersebut pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Sarana-Prasarana Dinas Perhubungan

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
1	Tanah	210.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	25.976.178.263,27
	a. Alat Angkutan	9.360.755.257,00
	b. Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5.803.103.579,28
	c. Alat Pertanian	5.494.500,00
	d. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.832.854.961,00
	e. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.318.517.989,74
	f. Alat Kedokteran Dan Kesehatan	4.000.000,00
	g. Alat Laboratorium	9.400.000,00
	h. Komputer	700.889.873,11
	i. Rambu - Rambu	8.246.699.753,00
	j. Peralatan Olah Raga	3.346.000,00
3	Gedung dan Bangunan	26.194.639.149,04
	a. Bangunan gedung	6.899.254.483,04
	b. Tugu titik control/pasti	1.882.076.400,00
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	46.394.868.926,94
	a. Jalan dan Jembatan	2.566.373.600,00
	b. Bangunan air	229.341.500,00
	c. Instalasi	32.736.132.757,00
	d. Jaringan	13.972.399.813,94
5.	Aset tetap lainnya	21.209.700,00
	a. Buku perpustakaan	4.099.700,00
	b. Barang bercorak kesenian	0,00
	c. Aset dalam renovasi	15.110.000,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 11 (sebelas) unit kendaraan roda empat, 9 (sembilan) unit kendaraan roda enam dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda dua. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor

umum relatif sudah tersedia meliputi aula/ruang rapat, ruang arsip, ruang tamu, pojok rokok dan musholla.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

a. Ruang laktasi berukuran 4,5 m2, yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan sofa dan meja.
b. Bangunan ramah disabilitas
   Kantor Dinas, Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Terminal telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
   - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat;
   - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat pada jalan menuju toilet;
   - ruang rapat dan ruang pelayanan umum yang berada di lantai 1 sehingga mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat;
   - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses.
d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.
g. Bus sekolah sebanyak 7 unit yang melayani siswa-siswi secara gratis untuk keberangkatan dan kepulangan sekolah. Salah satunya adalah bus untuk disabilitas yang didesain khusus untuk siswa-siswi difabel.

Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan

Ruang tunggu bagi untuk difabel

Ruang Rapat/Aula di lantai 1

Ruang Laktasi Terminal Semin

Ruang Laktasi UPT PKB

Dus sekolah

Dus sekolah

Dus sekolah dibatal

Ruang laktasi UPT PKB

Pojok ruang

Ramp di UPT PKB

Selain aset dan modal di atas, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Perhubungan berkewajiban untuk memenuhinya. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk

bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Berikut kami sajikan perlengkapan jalan berdasarkan data dari bidang lalu lintas tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Fasilitas Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Fasilitas Perlengkapan Jalan Perhubungan	Satuan	Jumlah
1	Terminal	Unit	1
2	Halte	Unit	47
3	Rambu rambu lalu lintas	Unit	4.704
4	Traffic light/APILL	Unit	8
5	Warning lamp	Unit	49
6	Guardrail	Unit	10.019
7	Marka jalan	Meter	57.539
8	Delinjator	Meter	2.976
9	Cermin tikung	Unit	136
10	PJU	Unit	22.992

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari sejauh mana Pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD (IKU), Indikator SPM bidang Perhubungan, Indikator Kinerja Khusus (IKK) maupun Pencapaian Realisasi Anggaran.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan. Pencapaian indikator-indikator kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan serta anggaran dan realisasi program/kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	**IKU (Indikator Kinerja Utama)**															
A.1	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	57,91	59,16	61,68	63,53	65,05	56,28	56,18	61,44			97,63	94,96	99,61		
B.	**Indikator Kinerja Sasaran**															
B.1	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	57,91	59,16	61,68	63,53	65,05	56,28	56,18	61,44			97,16	94,96	99,62		
B.2	Nilai AKIP PD	80,10	80,35	82,70	82,81	84,00	80,17	82,32	82,61			100,09	102,31	100,02		
C.	**Indikator Kinerja Program**															
C.1	Persentase capaian penyelenggara- an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Lalu Lintas	4,30	4,50	9,50	10,50	11,00	5,70	8,00	11,65			132,56	177,78	122,63		
C.2	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal	66,30	66,53	66,55	66,57	66,58	57,07	52,96	65,50			85,80	79,65	98,42		
C.3	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran	70,84	71,41	72,56	74,85	75,44	72,66	69,32	73,92			102,57	97,20	101,99		
C.4	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00	97,32	97,62	95,00			99,30	99,36	96,45		
D.	**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**															
D.1	**IKK Outcome**															
D.1.1	Rasio konektivitas Kabupaten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,59			100,00	100,00	196,67		
D.1.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05			100,00	100,00	100,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
D.2	**IKK Output**															
D.2.1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan type C	75,04	78,34	81,04	83,60	89,19	84,00	87,00	92,00			110,98	113,55	115,47		
D.2.2	Terlaksanaya pelayanan uji berkala	46,50	47,00	48,00	49,00	50,00	40,00	32,00	32,00			86,02	68,09	66,67		
D.2.3	Pemenuhan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		
D.2.4	Terwujudnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		

Berdasar tabel 2.4 di atas tergambar kinerja pelayan Dinas Perhubungan dikaitkan target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan. Capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 61,44% atau 99,61% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 61,68%. Pencapaian indikator ini sangat tergantung pada capaian indikator program di bidang dan UPT.

b. Indikator Kinerja Sasaran

Dari 2 (dua) indikator kinerja Sasaran Dinas Perhubungan, untuk indikator Nilai AKIP PD telah memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan indikator sasaran utama Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sampai dengan tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan di Renstra 2022-2026.

c. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja Program Dinas Perhubungan sesuai Renstra tahun 2022-2026 ada 4 indikator yaitu:

1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Lalu Lintas
2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal
3. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran, dan
4. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2024 dari 4 (empat) indikator kinerja program di bidang dan UPT, sebanyak 2 (dua) indikator tercapai dan 2 (dua) indikator kinerja program tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah:

1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal.

   Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan pendapatan retribusi terminal yang hanya mencapai 79% dari target yang ditetapkan. Retribusi parkir di terminal yang ditargetkan sebesar Rp16.450.000,00 hanya tercapai Rp12.994.400,00. Hal ini disebabkan semakin menurunnya angkutan umum yang masuk dan parkir di Terminal TipeC Wonosari.

2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

   Indikator ini dihitung dengan rumus (jumlah kendaraan lulus uji / jumlah kendaraan yang melakukan uji) x 100%. Pada tahun 2024 dari jumlah kendaraan wajib uji yang ditargetkan melakukan uji sebanyak 4.142 kendaraan, hanya 3.935 yang melakukan uji, sehingga realisasi indicator ini hanya mencapai 95%.

d. Indikator Kinerja Kunci

Pencapaian kinerja pelayanan berdasar Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan cukup baik. Dari 2 (dua) indikator Outcome yaitu Rasio konektifitas kabupaten dan V/C Ratio di Jalan Kabupaten kedua nya tercapai dengan baik sekali. Meskipun demikian masih ditemui kendala dari pencapaian indikator V/C Ratio di Jalan Kabupaten, karena angka tersebut selama 3 tahun berturut-turut hanya didasarkan dari survei jaringan trayek yang dilaksanakan tahun 2020

Pagu dan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dalam pencapaian indikator kinerja perangkat daerah adalah sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026

Urusan	Target Pendapatan Penangkut Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
WLUD																	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	90,00	9,00	90,00	-	-	[illegible]	[illegible]
Program Pengelolaan dan Konservasi Transportasi Untuk Tata Ruang	3.706.143.000	2.267.260.000	2.229.968.000	-	-	3.705.147.300	2.224.324.434	2.229.139.000	-	-	99,97	98,08	99,98	-	-	21,22	47,46
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Saluran Ruang Strategis Kewilayahan dan Kawasan	3.706.143.000	2.267.260.000	2.229.968.000	-	-	3.705.147.000	2.224.324.434	2.229.129.000	-	-	99,97	98,08	99,98	-	-	21,22	47,46
Pemanfaatan Ruang Saluran Ruang Strategis Kwa Cultural Sites	3.706.143.000	2.267.260.000	2.229.968.000	-	-	3.705.147.000	2.224.324.434	2.229.129.000	-	-	99,97	98,08	99,98	-	-	21,22	47,46
Program Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.966.302.408	4.031.979.282	4.047.401.408	-	-	3.226.346.516	4.031.979.402	4.043.177.625	-	-	87,29	97,94	99,93	-	-	4,97	99,93
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Penangkut Daerah	12.921.000	15.015.000	18.342.000	-	-	13.267.000	14.852.000	16.142.000	-	-	98,98	98,94	98,98	-	-	6,87	26,40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penangkut Daerah	40.873.000	58.512.000	36.717.000	-	-	40.537.000	58.345.000	36.316.000	-	-	99,18	99,71	99,89	-	-	8,33	21,88
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA (KUA-PPAS)	400.000	312.000	316.000	-	-	400.000	310.000	316.000	-	-	100,00	99,36	100,00	-	-	20,26	-16,47
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (KUP)	325.000	300.000	108.000	-	-	325.000	300.000	108.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	1,05	33,02

Urusan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450,000	570,000	910,000	-	-	450,000	510,000	910,000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	13,04	47,06
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	450,000	300,000	800,000	-	-	450,000	300,000	800,000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-33,34	-46,66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	525,000	2,200,000	1,300,000	-	-	525,000	2,200,000	1,300,000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	139,07	52,38
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,800,000	1,742,000	-	-	-	1,800,000	1,742,000	-	-	-			400,00	-	-	-3,33	-100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,216,010,750	2,750,510,000	2,149,890,100	-	-	4,096,982,100	2,752,420,070	2,014,347,027	-	-	96,99	96,99	97,23	-	-	-32,48	-40,23
Penyusunan Dan Ada Perangkat Kinerja	4,216,010,750	2,750,000,000	2,132,990,100	-	-	4,075,012,100	2,750,070,011	2,002,347,027	-	-	96,69	96,99	97,70	-	-	-31,93	-40,36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1,200,000	1,300,000	900,000	-	-	1,200,000	1,300,000	900,000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	20,92	-40,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	7,500,000	11,800,000	13,100,000	-	-	7,500,000	11,800,000	13,100,000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	26,77	7,48
Penyusunan Pelaporan dan Analisa Pengelola Barang/Aset Penggunaan	250,000			-	-	250,000			-	-		400,00	400,00	-	-	400,00	400,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400,000	750,000	400,000	-	-	400,000	750,000	400,000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	7,48	-28,52

Urusan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Ini					Realisasi Capaian Tahun Ini					Rata-rata Capaian pada Tahun Ini					Status Ketercapaian	
	1 (Awal)	2 (Awal)	3 (Akhir)	4 (Akhir)	5 (Akhir)	1 (Awal)	2 (Awal)	3 (Akhir)	4 (Akhir)	5 (Akhir)	1 (Akhir)	2 (Akhir)	3 (Akhir)	4 (Akhir)	5 (Akhir)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Perencana an Kebutuhan Barang Milik Daerah (SIPK)	130,000	145,000	120,000	-	-	110,000	140,000	120,000	-	-	110,00	100,00	100,00	-	-	14,77	32,49
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada (SIPD)	-	150,000	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	80,00	50,00	140,00	-	-	80,00	80,00
Pendataanaan Barang Milik Daerah pada (SIPD)	500,000	400,000	150,000	-	-	500,000	400,000	150,000	-	-	130,00	100,00	140,00	-	-	30,49	30,06
Kegiatan Administrasi Pengelolaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,400,000	1,300,000	1,200,000	-	-	1,400,000	1,300,000	1,300,000	-	-	110,00	100,00	110,00	-	-	4,44	30,30
Pelaksana Pengelolaan Retribusi Daerah	1,400,000	1,300,000	1,300,000	-	-	1,400,000	1,300,000	1,300,000	-	-	110,00	100,00	100,00	-	-	4,44	30,30
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	80,150,000	45,601,000	-	-	10,240,000	87,607,770	44,761,100	-	-	97,00	96,00	97,00	-	-	230,50	192,77
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	40,000,000	-	-	-	-	45,117,570	-	-	-	-	-	40,00	-	-	40,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,675,000	11,110,000	45,511,000	-	-	1,675,000	11,110,000	44,337,100	-	-	110,00	100,00	97,41	-	-	497,17	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	520,000	450,000	400,000	-	-	520,000	400,000	400,000	-	-	110,00	100,00	100,00	-	-	-2,14	

Urusan	Target Kinerja Penyelenggara Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Data Hasil Pendukung	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)		1 (2020)	2 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.500.000	7.140.324	-	-	-	8.500.000	8.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	-
Terselesaikan Peraturan yang Perundang-Undangan	3.700.000	23.900.000	-	-	-	3.700.000	23.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	215,68	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.222.300	276.260.308	242.396.309	-	-	103.100.900	256.407.190	215.824.236	-	-	93	94	88	-	-	97,57	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	14.804.500	104.500	-	-	10.000.000	14.809.000	100.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	10,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	107.879.504	116.017.500	-	-	8.500.000	107.900.000	110.394.000	-	-	100,00	99,70	95,08	-	-	388,36	-
Penyediaan Barang Logistik Kantor	90.000.000	91.757.409	-	-	-	84.900.000	91.000.240	-	-	-	-	-	-	-	-	91,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.015.000	16.520.000	11.257.500	-	-	12.015.000	16.520.000	11.257.500	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	1,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.060.324	7.200.000	-	-	7.200.000	7.200.000	7.060.000	-	-	100,00	100,00	98,05	-	-	3,36	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	8.800.000	8.300.000	-	-	-	8.375.000	8.100.000	-	-	95,04,00	94,04	100,00	-	-	95,04,00	-
Pemeliharaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.326.400	140.720.324	85.400.200	-	-	41.364.600	121.610.240	73.440.000	-	-	79,02	84,80	86,00	-	-	85,32	-
Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.500.500	310.000	210.000	-	-	4.500.500	310.000	210.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	42,75	-
Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	30.400.324	226.300.000	-	-	-	30.720.000	224.900.000	-	-	95,04,00	95,07	95,37	-	-	95,04,00	-

Urusan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Kinerja Capaian pada Tahun ke					Tingkat Pencapaian	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Rata-rata	Realisasi s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Mobil		15.777.000 15.777.000					15.777.000 15.777.000									100,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.000.000	330.000.000	-	-		25.000.000	324.000.000	-	-	100,00	100,00	98,18	-	-	100,00	
Kegiatan Perpanda an Jalan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	110.000.000	344.371.000	217.000.000	-	-	110.000.000	334.000.000	300.000.000	-	-	97,78	97,00	138,25	-	-	97,89	
Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	700.000	400.000	110.000	-	-	700.000	310.000	94.000	-	-	100,00	77,50	85,45	-	-	87,73	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	200.000.000	180.000.000	-	-	140.000.000	191.000.000	175.000.000	-	-	97,14	95,50	97,22	-	-	96,62	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.000.000	42.000.000	35.000.000	-	-	37.000.000	42.000.000	35.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	740.000.000	1.240.000.000	900.000.000	-	-	740.000.000	1.220.000.000	870.000.000	-	-	100,00	98,39	96,67	-	-	98,35	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	710.000.000	780.000.000	740.000.000	-	-	710.000.000	770.000.000	730.000.000	-	-	100,00	98,72	98,65	-	-	99,12	

Urusan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Tren Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Mobil	500.000	3.000.000		-	-	600.000	2.400.000		-	-						80,57	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	21.700.000	54.000.000	55.000.000	-	-	21.700.000	54.000.000	52.429.084	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	74,44	-
Pemeliharaan/rehab Bangunan Kantor dan Bangunan lainnya	65.000.000	200.000.000	133.000.000	-	-	65.000.000	201.000.000	133.000.000	-	-	100,00	99,00	99,98	-	-	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000		-	-	10.000.000	10.000.000		-	-	-	-	-	-	-	50,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	11.000.000	-	-	-		11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-
Pelatihan Organisasi	1.750.000		-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.750.000		-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.703.450.208	14.796.036.474	15.622.754.100	-	-	14.624.714.929	14.681.867.656	15.044.285.300	-	-	99,46	99,22	99,87	-	-	17,00	-
Kegiatan Penyelidikan Pelanggaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.319.252.208	12.468.198.999	17.325.334.000	-	-	11.266.159.786	12.377.611.866	17.261.616.626	-	-	99,40	99,15	99,07	-	-	24,54	-
Penyelidikan Pelanggaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.346.585.704	13.385.300.394	15.289.192.700	-	-	10.876.567.710	11.863.653.115	15.225.291.010	-	-	88,09	88,73	99,63	-	-	19,44	-

Urusan	Target Pendapatan Pemerintah Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Fisik Capaian pada Tahun ke					Sisa dan Perbandingan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	1 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kebudayaan dan Pariwisata dan Perlindungan Jawa	971.102.942	964.962.324	2.047.367.400	-	-	971.102.971	963.979.752	2.027.040.327	-	-	99,99	99,77	99,12	-	-	211,69	-
Kegiatan Pengelola an Terminal Penumpang Tipe B	340.000.000	339.965.340	364.013.000	-	-	379.142.000	378.515.000	364.131.000	-	-	99,79	99,35	99,87	-	-	4,32	-
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	300.000.000	196.400.000	93.500.000	-	-	304.000.000	149.646.150	92.340.000	-	-	98,79	76,24	98,80	-	-	46,69	-
Kebudayaan dan Pariwisata dan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	74.500.000	73.140.200	300.873.000	-	-	74.310.000	73.367.700	300.873.000	-	-	99,74	99,87	99,99	-	-	42,51	-
Kegiatan Pemeliharaan, Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Publik	964.215.242	966.452.432	1.025.310.000	-	-	960.327.150	968.710.132	1.024.086.130	-	-	99,80	99,82	99,88	-	-	4,32	-
Fasilitas Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Lis Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Publik Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	964.215.242	966.452.432	1.025.310.000	-	-	960.327.150	968.710.132	1.024.086.130	-	-	99,80	99,82	99,88	-	-	4,32	-
Kegiatan Pengelola Kawasan Bencana	434.425.300	340.110.000	320.987.000	-	-	430.900.840	340.100.000	309.309.373	-	-	99,79	99,27	96,33	-	-	-12,38	-

Urusan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Tren rata Perkembangan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)		1 (2022)	2 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurus Daerah Kemitraan Bencana	-	24.400.000	400.000	-	-	-	24.400.000	400.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	
Pengadaan Kendaraan Roda (3) Berkaitan Kewajiban Bencana	132.625.000	140.000.000	132.400.000	-	-	101.100.000	100.172.100	132.400.000	-	-	76,00	99,34	100,00	-	-	99,21	
Tersedia Suara Lokal (3) Pengadaan Bencana Kemitraan Bencana	50.000.000	53.400.000	53.000.000	-	-	50.000.000	50.400.000	52.000.000	-	-	100,00	100,00	101,00	-	-	-4,49	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengurus Kewajiban Bencana	36.000.000	41.000.000	104.000.000	-	-	36.000.000	41.000.000	102.775.000	-	-	100,00	100,00	98,80	-	-	144,40	
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Pelaksanaan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	420.700.000	724.700.000	760.700.000	-	-	420.700.000	724.702.704	759.970.000	-	-	100,00	100,00	99,99	-	-	37,39	
Pengadaan Dan Pengembangan Operasional Pelaksana Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.200.000	8.800.000	750.000.000	-	-	11.200.000	30.700.000	750.574.000	-	-	100,00	100,00	99,99	-	-	1.000,00	
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Pelaksanaan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	1.000.000	-	-	407.400.000	386.000.257	1.000.000	-	-	96,40	100,00	99,97	-	-	115,12	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000	7.000.000	5.100.000	-	-	5.000.000	7.000.000	5.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-0,98	

Uraian	Target Pendapatan Pemungut Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata-rata Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2020)	4 (2021)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2021)	1 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Berbadan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.131.810.000	113.140.000	113.600.000	-	-	1.131.810.000	113.140.000	113.540.000	-	-	100,00	100,00	99,96	-	-	44,97	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Berbadan Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.131.810.000	113.140.000	113.600.000	-	-	1.131.810.000	113.140.000	113.540.000	-	-	100,00	100,00	99,96	-	-	44,97	
Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Angkutan Orang dalam Jaringan Untuk Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.248.000	49.960.000	51.100.000	-	-	45.100.000	49.800.000	51.442.000	-	-	99,68	99,76	100,69	-	-	57,47	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan Angkutan Orang dalam Trayek Pemerintah Kabupaten/Kota	29.700.000	32.300.000	34.400.000	-	-	29.325.000	32.300.000	34.184.000	-	-	98,73	100,00	99,63	-	-	55,88	

Uraian	Target Pendapatan Pertanggal Dalam Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)		1 (2023)	2 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Cendekia Pemenuhan Pengurusan Pendaftaran dan Penyelenggaraan Angkatan Orang Kerja Tugas Kewenangan Kabupaten Kota Dalam Sebaran Pelayanan Pendidikan Berdasarkan Term Bagian Secara Elektronik	14.240.000	15.000.000	27.257.500			16.200.000	16.000.000	27.257.500			113,8 / 80,04	106,7 / 80,36	100 / 100,00			0,7 / 39,17	(19)

Data tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran belanja Dinas Perhubungan mengalami fluktuatif setiap tahunnya dengan rerata pertumbuhan 7,62% setiap tahunnya. Pada awal tahun 2023 Dinas Perhubungan anggaran belanja Dinas Perhubungan turun dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan penganggaran TPP untuk PNS yang semula di masing-masing perangkat daerah menjadi terpusat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Selain itu adanya penurunan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan juga menyumbang terhadap menurunnya anggaran tahun 2023. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan cukup tinggi.

Sedangkan pertumbuhan realisasi 7,82% per tahun. Realisasi belanja dapat dicapai dengan baik dapat dilihat dari rasio realisasi terhadap anggaran setiap tahun yang selalu di atas angka 90%. Alokasi terbesar dari belanja langsung adalah pada belanja barang dan jasa khususnya peningkatan kinerja petugas pengatur lalu lintas dan listrik PJU, selain itu belanja modal untuk peningkatan angkutan, perlengkapan jalan dan sarana perhubungan. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan transportasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Layanan Dinas Perhubungan menyasar berbagai kelompok, antara lain pengguna jalan (pedestri, pengendara kendaraan bermotor dan penumpang angkutan umum), pelaku usaha perhubungan (pengusaha angkutan , terminal, parkir dan lain-lain).

a. Pengguna jalan:

Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan dan keamanan jalur pedestrian serta mengatur lalu lintas di sekitar jalan yang dilalui pejalan kaki. Selain itu layanan yang diberikan Dinas Perhubungan adalah memastikan kendaraan laik jalan, mengatur lalu lintas, dan memberikan perizinan terkait kendaraan bermotor. Selanjutnya terkait dengan penumpang angkutan umum Dinas Perhubungan memastikan keselamatn, kenyamanan dan keteraturan angkutan umum, termasuk perizinan dan pengawasan operasional.

b. Pelaku Usaha Perhubungan

Layanan pada kelompok ini terkait dengan perizinan, pengawasan, dan layanan lain terkait angkutan umum termasuk transportasi barang dan orang, termasuk dalam kelompok ini adalah pelaku usaha di lingkungan terminal dalam hal perizinan dan pengawasan operasional. Selain itu Dinas Perhubungan juga melayani terkait pengaturan perparkiran baik parkir di tepi jalan umum maupun parkir di luar badan jalan, termasuk di dalamnya pengelolaan pendapatan retribusi parkir.

c. Lain-lain

Di luar kelompok di atas, Dinas Perhubungan juga memberikan layanan dan informasi terkait transportasi

umum, peraturan lalu lintas dan penegakan disiplin berkendara bekerjasama dengan dinas/instansi vertical yang lain. Selain itu layanan juga disasarkan kepada sekolah-sekolah dengan pelayanan bus sekolah gratis, sosialisasi peraturan lalu lintas dan kerjasama lain seperti pemilihan pelajar pelopor.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Permasalah pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul antara lain adalah:

a. Pelayanan angkutan penumpang dan barang belum optimal. Hal ini terlihat dari rasio konektifitas kabupaten yang masih rendah. Sebagian besar dari angkutan umum yang ada dan terdaftar sudah tidak beroperasi lagi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa transportasi dan pengelolaan usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional (milik pribadi/perorangan). Selain itu, jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.

b. Belum Optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan. Angka ketersediaan perlengkapan jalan masih cukup rendah menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan dan kejahatan di Gunungkidul. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas secara menyeluruh mencerminkan bahwa penanggulangan masalah transportasi belum menjadi prioritas bagi pemangku kebijakan.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas. Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, selain dipengaruhi oleh kurangnya perlengkapan jalan juga disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran, kedisiplinan masyakat/pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut serta lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

d. Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai. Terminal Tipe C Semin sebagai terminal yang menjadi milik dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul saat ini masih belum dikelola dengan baik. Beberapa indikator yang menjadi standar pelayanan minimal terminal tipe C masih belum terpenuhi 100%. Hal ini menjadi salah satu penyebab layanan terminal belum bisa diberikan secara optimal.

e. Pengelolaan perparkiran belum optimal. Masih maraknya praktik parkir liar baik di ruas jalan umum maupun di lokasi obyek wisata, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan dan sarana parkir yang disediakan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

f. Kurangnya kesadaran wajib uji untuk melakoasakan uji berkala. Masyarakat pemilik kendaraan perlu sadar tentang pentingnya uji kendaraan untuk keselamatan dan kelayakan kendaraan. Kurangnya kesadaran ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan masalah teknis pada kendaraan.

2.2.2 Isu Strategis

a. Isu Strategis KLHS

Isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang relevan dengan permasalahan PD adalah:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum karena belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas;
2. Rendahnya tingkat disiplin berlalulintas;
3. Masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia;
4. Terjadinya kemacetan lalu lintas (terutama pada ruas jalan menuju akses wisata);
5. terbatasnya pelayanan angkutan umum; serta
6. belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan.

b. Isu Strategis Global

Isu strategis global perhubungan mencakup tantangan dan peluang yang berdampak besar pada sektor transportasi di berbagai negara, yaitu:

1. *Perubahan iklim*, menyebabkan peningkatan intensitas bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang dapat merusak infrastruktur jalan dan transportasi darat. Hal ini menjadi tantangan bagi perhubungan darat dalam hal pemeliharaan, pengoperasian dan peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim.
2. *Mobilitas perkotaan berkelanjutan*, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Hal ini memicu kebutuhan untuk beralih ke sistem transportasi perkotaan yang lebih berkelanjutan. Solusi pengembangan transportasi publik yang efisien, peningkatan penggunaan sepeda, dan promosi pejalan kaki dapat membantu mengurangi dampak negatif transportasi darat terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
3. *Keamanan lalu lintas jalan*, Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian dan cedera di seluruh dunia. Perhubungan darat memiliki peran penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman melalui peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas kendaraan, peningkatan kesadaran pengendara, dan pelaksanaan aturan lalu lintas yang ketat guna mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Peningkatan keamanan transportasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

c. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional yang relevan dengan urusan perhubungan diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi darat yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu-isu tersebut antara lain:

1. *Infrastruktur*, peningkatan kualitas jalan, pembangunan tol, jembatan dan terminal bus, serta pengembangan transportasi publik yang terintegrasi.
2. *Keselamatan dan Keamanan*, prioritas menekan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan standar keselamatan kendaraan dan jalan serta mengoptimalkan system manajemen lalu lintas.
3. *Teknologi*, pemanfaatan teknologi seperti system transportasi cerdas, e-tiket, dan aplikasi transportasi online untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan.
4. *Logistik*, peningkatan efisiensi dan efektifitas system logistik, penanganan ODOL, dan pengembangan moda transportasi yang lebih berkelanjutan.
5. *Pengendalian transportasi*, penanganan transportasi selama musim lebaran, natal dan tahun baru serta hari libur dengan memastikan kelancaran lalu lintas.
6. *Peningkatan konektifitas*, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, terutama di daerah yang belum terhubung dengan baik untuk mendukung pemerataan ekonomi.
7. *Berkelanjutan*, pemanfaatan energi terbarukan dalam system transportasi, pengembangan kendaraan listrik dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

d. Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan DIY

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY tahun 2022-2027 ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan DIY yaitu:

1. Potensi Kunjungan Wisata Ke Wilayah DIY
2. Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat
3. Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas
4. Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan
7. Pemanfataan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi

Berdasarkan permasalahan PD yang diuraikan diatas, dan memperhatikan isu-isu strategis lingkungan dinamis terkait dengan perhubungan, maka isu-isu strategis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi
2. Inventarisasi APJ Abonemen dan pemenuhan ketersediaan perlengkapan jalan
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi keselamatan lalu lintas
4. Pengembangan terminal tipe C Semin beserta fasilitas pendukungnya

5. Pengembangan fasilitas parkir dan pembinaan/pengawasan pengelolaan perparkiran
6. Penegakan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.

Isu Strategis PD terurai di tabel 2.6.

Tabel 2.6 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLEIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan darat	Pelayanan angkutan penumpang dan barang belum optimal	Belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum; karena belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas;	Perubahan iklim, mobilitas perbatasan berkelanjutan, dan keamanan lalu lintas jalan	Infrastruktur, Kewilayahan dan keamanan, Teknologi, Logistik, Pengendalian transportasi; Peningkatan konektivitas, dan berkelanjutan	Potensi Kunjungan Wisata ke Wilayah DIY	Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi
	Belum Optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan	Rendahnya tingkat disiplin berlalulintas;			Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat	Inventarisasi AJU Aksesmen dan pemenuhan ketersediaan perlengkapan jalan
	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keterpilhan lalu lintas	Masih terbatasnya kompetensi konsiler daya manusia;			Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi keselamatan lalu lintas
	Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai	Terjadinya kemacetan lalu lintas terutama pada ruas jalan menuju akses wisata;			Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan	Pengembangan terminal tipe C Sentin beserta fasilitas pendukungnya
	Pengelolaan perparkiran belum optimal	terbatasnya pelayanan angkutan umum; serta			Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi	Pengembangan fasilitas parkir dan pembinaan/pengawasan pengelolaan perparkiran
	Kurangnya kesadaran wajib uji untuk melaksanakan uji berkala	belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan;				Penegakan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan Dinas Perhubungan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan kondisi pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Bapperida menetapkan Tujuan Perangkat Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Tujuan PD ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran "Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan berlelanjutan" maka sesuai dengan peloritas arahan pembangunan 2025 - 2030 yaitu fokus pada misi ke lima yakni "Mentajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta Menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia"

Misi Bupati/Wakil Bupati tersebut diterjemahkan kedalam tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kaburpaten Gunungkidul yakni "Meningkatnya Konektivitas Daerah".

3.2 Sasaran Dinas Perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja urusan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2025 – 2029 terdiri atas 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran yaitu: Indeks layanan transportasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya konektivitas daerah		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	Rumus: (jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/(jumlah kebutuhan trayek)
		Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas	Indeks layanan transportasi (Indeks)	74,54	75,07	75,98	76,97	77,97	78,34	Rumus:(Persentase pelanggaran yang berhasil ditindak x 15%) +(Persentase tingkat kecelakaan perlintasan angkutan umum x 10%) + (Persentase terselesaikan laporan pelanggaran: terminal penumpang angkutan lain C x 25%)+(Persentase ketersediaan fasilitas dan pelengkapan jalan x 30%)+(Persentase kendaraan yang melakukan uji laik jalan x 15%)

3.3 Strategi Dinas Perhubungan

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah bagi stakeholders layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*) secara periodik.

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda bagi segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal PD;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan menetapkan langkah-langkah serta upaya di antaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pencapaian indikator sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1.	Sasaran 1. Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas	1.1 Indeks layanan transportasi (Indeks)	Meningkatkan layanan lalu lintas dan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau

Setelah penentuan strategi perangkat daerah baik tujuan maupun sasarannya, maka dapat disusun tahapan pembangunan yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Tahapan Renstra Dinas Perhubungan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Pengutatan Pondasi Pembangunan melalui penyediaan layanan perhubungan	Percepatan Pondasi Pembangunan melalui melalui penyediaan layanan perhubungan	Peningkatan Pondasi Pembangunan melalui melalui penyediaan layanan perhubungan	Optimalisasi Pondasi Pembangunan melalui melalui penyediaan layanan perhubungan	Pemantapan Pondasi Pembangunan melalui melalui penyediaan layanan perhubungan

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul memiliki strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dengan teknik perumusan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Izin Penyelenggara Jasa Angkutan Orang	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur jalan serta perlengkapan pendukungnya untuk mendukung kelancaran dan keselamatan berlalu lintas	Meningkatkan penyediaan dan kualitas perlengkapan jalan serta pembangunan FJU	
2	Pemenuhan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Meningkatkan layanan perhubungan berbasis perhubungan jangkauan angkutan umum dan optimalisasi sdl kendaraan	Meningkatkan layanan angkutan dan pengelolaan terminal penumpang tipe C	
		Meningkatkan kompetensi SDM bidang perhubungan untuk mendukung pelayanan yang lebih profesional dan berkualitas	Meningkatkan layanan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	
		Mengoptimalkan manajemen dan sistem rekayasa lalu lintas	Meningkatkan layanan pengujian berbasis kendaraan bermotor	
			Meningkatkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah	
			Meningkatkan kompetensi SDM bidang perhubungan yang profesional dan berkualitas	
			Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian transportasi untuk keselamatan lalu lintas	

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan strategi dan

Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkemudahan		
Misi V	Mewujudkan kehidupanan seimbang dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta Menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya konektivitas daerah	Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas	Strategi 1.2 Meningkatkan layanan lalu lintas dan angkutan yang aman, nyaman dan berjenghes	Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan penyediaan dan kualitas perbaikan jalan serta penanganan PJU
			Arah Kebijakan 1.2 Meningkatkan layanan angkutan dan pengkajian terminal penumpang tipe C
			Arah Kebijakan 1.3 Meningkatkan layanan perizinan atau penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
			Arah Kebijakan 1.4 Meningkatkan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor
			Arah Kebijakan 1.5 Meningkatkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah
			Arah Kebijakan 1.6 Meningkatkan kompetensi SDM bidang perhubungan yang profesional dan berkualitas
			Arah Kebijakan 1.7 Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian transportasi untuk keselamatan lalu lintas

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG/URUSAN

4.1 Program Dinas Perhubungan

Dalam upaya untuk mencapai visi misi Bupati terpilih yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah yang diterjemahkan melalui program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 terbagi dalam lima tahun dari tahun 2026-2030.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk menudapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk menginplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau bebetapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Selama periode tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan merencanakan akan melaksanakan 3 program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

4.2 Kegiatan Dinas Perhubungan

Selama periode 5 tahun kedepan, Dinas Perhubungan merencapakan akan melaksanakan 16 kegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Dearah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam rayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan-kegiatan tersebut di atas terjabarkan dalam 60 sub kegiatan sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan							
Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya konektivitas daerah				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		
		Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas			Indeks layanan transportasi (Indeks)		
			Tersedianya Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis		Persentase penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di kawasan strategis (%)	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	
				Dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Dokumen)	1.03.13.3.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul (Dokumen)	1.03.13.3.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sekumbu (Dokumen)	1.03.13.3.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	

(01)	(02)	(05)	(06)	(08)	(09)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Gunung Sewu (Dokumen)	1.03.13.5.02.0003 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Gunung Sewu	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sukolilanan (Dokumen)	1.03.13.5.02.0015 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sukolilanan	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul (Dokumen)	1.03.13.5.02.0018 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.15.01 - PROGRAM PEMELIHARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dimuat dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]	[08]
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Disusun dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Disusun dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengurus Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengurus Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0003 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kesesuaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen	2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pembelian dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Pemutakhiran Pendidikan Undangan (Orang)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. (Orang)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengadaan Administrasi kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. (Orang)	2.15.01.2.05.0006 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.15.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dipublikasi (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kearsipan Tahun (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06.0010 - Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD	
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

(01)	(02)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

(0.1)	(0.2)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum ber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kredibilitas bermotor lalu jalan		Persentase kendaraan yang laik uji (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketersediaan fasilitas terminal dan angkutan bus sekolah		Persentase ketersediaan fasilitasi terminal tipe C dan bus sekolah (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kewaluatan pengguna jalan dan angkutan		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang berhasil ditindak (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran	Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.03.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Meningkatnya keterwelluan fasilitas terminal dan angkutan bus sebatah	Pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe C Sendin	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terrehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang yang terrehabilitasi dan rekonstruksi (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			Meningkatnya keterpaduan perencanaan jalan dan perparkiran	Sistem penyelenggaraan dan fasilitas parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Pendelegasian Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Pendelegasian Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Pendelegasian Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya Keselamatan Berlalu lintas jalan	Ketuntasan wajib uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen (Buku) Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Meningkatnya keselamatan pengguna jalan dan angkutan	Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya keterwilayah layanan terminal dan angkutan bus sekolah	Layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jaja Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Jaja Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.14 - Penerbitan Jaja Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perizinan lain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perizinan lain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan lain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

SASARAN / TUJUAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDICATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN UNTUK DAP PENETAAN RUANG				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1.02.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN MENAAN VERIFIKASI URUSAN TATA RUANG				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terselenggara Pelaksana LLAJ di Lakukan Strategis	Persentase penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di lokasi strategis	45	55	[illegible]	65	[illegible]	75	[illegible]	85	[illegible]	100	[illegible]	
1.02.12.0.02 Pemanfaatan Ruang Dalam Ruang Strategis Kawasan dan Kabupaten				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Dokumen pemanfaatan ruang dalam ruang strategis kawasan dan kabupaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Dalam Ruang Strategis Pusat Dalam Dharmasraya	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sebelum Ruang Strategis Kawasan Strategis	9	1		6		4		9		9		
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sebelum Ruang Strategis Sebelumnya	0	0		1		0		0		0		
1.02.13.3.02.0002 - Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Kawasan Strategis				740,000,000		3,400,000,000		1,832,000,000		3,760,000,000		1,848,000,000	
Terfasilitasinya Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sebelum Ruang Strategis Kawasan Strategis	9	1	740,000,000	6	3,400,000,000	4	1,832,000,000	6	3,760,000,000	6	1,848,000,000	
1.02.13.4.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Sebelum Ruang Strategis Sebelumnya						180,000,000		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terfasilitasinya Pemanfaatan Ruang Sebelum Ruang Strategis Sebelumnya	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Sebelum Ruang Strategis Sebelumnya	0	0		1	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	
1.02.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Sebelum Ruang Strategis Pusat Sebelum Ditetapkan						[illegible]		1,[illegible]		1,[illegible]		1,[illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Lintungkab)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Lintungkab)	0	0		1	400.000.000	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				20.499.344.750		21.557.596.325		21.975.343.052		20.941.328.129		22.284.479.484	
2.19.01 - PROGRAM PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA				9.116.282.000		8.906.630.000		8.611.400.309		6.776.850.000		6.878.690.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah	82,87	82,94	9.116.282.000	82,93	8.906.630.000	85,93	8.611.400.309	82,93	6.776.850.000	83,94	6.878.690.000	
2.19.01.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99.857.800		101.750.000		104.800.000		110.400.000		117.200.000	
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA OPD dan Laporan Hasil Kinerjanya Perangkat Dokumen RKA-OPD	1	1	99.857.800,00	1	101.750.000	1	104.800.000	1	110.400.000	1	117.200.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan RKA-SKPD	4	3		4		4		4		3		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan DPA-SKPD	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Permintaan Pembayaran	9	9		9		9		9		9		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Pemeriksaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Pemeriksaan Dokumen DPA-SKPD	3	3		3		3		3		3		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Berita Acara Hasil Pelatih Perang Ini Daerah Ditindaklanjuti Hidang Urusan yang Dengan Jalan Bangka Pemrintahan Daerah Pemerintahan Perangkat Daerah	0	0		0		1		0		0		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perang Ini Daerah	2	2		2		2		2		2		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen (Penetapan) Perangkat Daerah				Rp. [illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terwujudnya Dokumen Penetapan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Perangkat Daerah	4	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terwujudnya Dokumen RKA, DPA, DPPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselesaikan Dokumen Perubahan IKU OKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen Perubahan IKU OKPD	Jumlah Dokumen Perubahan IKU OKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen Perubahan IKU OKPD	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA OKPD				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terselesaikan Dokumen DPA OKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen DPA OKPD	Jumlah Dokumen DPA OKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen DPA OKPD	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA OKPD				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terselesaikan Dokumen Perubahan DPA OKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA OKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA OKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA OKPD	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.490.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		4.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselesaikannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kuantitasi Pengukuran Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kuantitasi Pengukuran Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19	19	[illegible]	19	[illegible]	19	[illegible]	19	[illegible]	19	[illegible]	
2.19.01.2.01.0000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	
2.19.01.2.01.0010 Meningkatnya Peran Perangkat Daerah Berbasis Hasil Sesuai yang Dituntut dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		-		[illegible]		-		-	
Terlaksananya Peran Perangkat Daerah Berbasis Hasil Sesuai yang Dituntut dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip Hasil Peran Perangkat Daerah Berbasis Hasil Sesuai yang Dituntut dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	-	0	-	1	[illegible]	0	-	0	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
[illegible] Administrasi Keuangan Pelaksanaan (Belanja)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (BKPD) dan Laporan Hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (BKPD)	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan (OPD)	6,66	8,Ka		9,66		9,00		9,50		9,00		
	Jumlah Laporan Keuangan (Triwulan/ Triwulanan/ Semesteran) BKPD dan Laporan Konsolidasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (OPD BKPD)	14	15		14		14		14		14		
[illegible] - Penyelesaian Gaji dan Tunjangan (GTT)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terselesaikan Gaji dan Tunjangan (GTT)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan (GTT)	6,66	5,74	[illegible]	9,66	[illegible]	9,00	[illegible]	9,00	[illegible]	9,00	[illegible]	
[illegible] - Monitoring dan Pengumpulan Laporan Keuangan Akhir Tahun (BKPD)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselesaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun (BKP) dan Laporan Hasil Koordinasi Pengisiannya Laporan Keuangan Akhir Tahun (KKP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (BKP) dan Laporan Hasil Koordinasi Pengisiannya Laporan Keuangan Akhir Tahun (KKP)	1	1	[illegible]	7	[illegible]	4	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
[illegible] Koordinasi dan Pengisiannya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (KKP)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terselesaikan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (KKP) dan Laporan Koordinasi Pengisiannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (KKP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (KKP) dan Laporan Koordinasi Pengisiannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester (KKP)	12	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	
[illegible] Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (KKP)	1	1	[illegible]	3	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Pengurusan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12		12		12		12		12		
5.18.01.2.04.0001 - Penyelenggaraan Pemeliharaan Kendaraan Barang Milik Daerah (SKPD)				195.000		256.000		250.000		304.000		300.000	
Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Barang Milik Daerah (SKPD)	Jumlah Barang yang Kendaraan Barang Milik Daerah (SKPD)	1	1	195.000	1	256.000	1	250.000	1	304.000	1	300.000	
5.18.01.2.05.0001 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada (SKPD)				300.0000		256.000		250.000		300.000		350.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	300.000	2	256.000	2	250.000	2	300.000	2	300.000	
5.18.01.2.06.0001 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada (SKPD)				400.000		400.000		400.000		800.000		750.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	400.000	12	400.000	12	400.000	12	800.000	12	750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah				2.041.000		1.806.000		1.800.000		1.800.000		1.041.000	
Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	2.041.000	12	1.806.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.041.000	
2.18.01.2.04.0001 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.041.000		1.806.000		1.800.000		1.800.000		1.041.000	
Terselenggara Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	2.041.000	12	1.806.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.041.000	
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				92.139.000		288.604.000		145.000.000		400.800.000		196.100.000	
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6	6	92.139.000	100	288.604.000	6	145.000.000	100	400.800.000	6	196.100.000	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pendidikan Korpri Pegawai	2	6		7		7		7		7		
	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	14	12		12		12		12		12		
	Jumlah Orang yang Mengisi Kebutuhan Perencana Perundang-Undangan	0	80		0		0		100		0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Pegawai Berkewajiban Tugas dan Fungsi yang Menggunakan Perlengkapan dan Peralatan	5	5		4		4		4		4		
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						155,000,000				155,000,000			
Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0		120	155,000,000	0		300	155,000,000	0		
2.18.01.2.06.0002 - Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				20,850,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		49,000,000	
Terlaksananya Tertibnya dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penatausaha dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	11	11	20,850,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	49,000,000	
2.18.01.2.10.0001 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				2,200,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		4,000,000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pendataan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pendataan Kinerja Pegawai	2	0	2,200,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	5,000,000	7	4,000,000	
2.18.01.2.05.0001 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2,700,000		80,000,000		85,000,000		80,000,000		40,000,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berbasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	3.740.000	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
5.2.0.0.1.2.2.0.0.0.0.0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				[illegible]		-		-		[illegible]			
Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pelaporan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	99	[illegible]	0	-	2	-	100	[illegible]	2	-	
5.2.0.0.2.2.0. Monitoring Evaluasi Perundang-Daerah				371.007.000		324.700.000		277.700.000		371.200.000		278.000.000	
Terlaksanya Monitoring Evaluasi Perundang-Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Dilaksanakan	12	12	371.007.000	12	324.700.000	12	277.700.000	12	371.200.000	12	278.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan ex Scop Dinyatakan pada (SKPD)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Realisasi Kontrajangan Tertib	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Pengelolaan ex Kepal Kewilayah dan Kinerjanya (SKPD)	12	12		12		12		12		12		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dimanfaatkan	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dimanfaatkan	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Dimanfaatkan	4	12		12		12		12		12		
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				92.000.000		12.800.000		13.700.000		13.000.000		14.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dimanfaatkan	1	4	92.000.000	4	12.800.000	4	13.700.000	4	13.000.000	4	14.000.000	
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Perawatan dan Perlengkapan Kantor				80.700.000		30.000.000		37.000.000		34.000.000		20.000.000	
Tersedianya Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Dimanfaatkan	4	12	80.700.000	12	30.000.000	12	37.000.000	12	34.000.000	12	20.000.000	
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.180.000		17.000.000		17.000.000		18.000.000		18.000.000	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Diselesaikan	8	4	16.500.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	[illegible]	4	[illegible]	
2.18.0.1.2.16.0000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.000.000	
Terselenggara Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersediakan	12	12	1.200.000	12	1.000.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.000.000	
2.18.0.1.2.16.0000 - Pendidikan Kedinasan Tanpa				12.000.000		12.000.000		14.000.000		12.000.000		14.000.000	
Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Tanpa	Jumlah Lagunan Pendidikan Kedinasan Tanpa	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	
2.18.0.1.2.16.0000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137.828.500		150.000.000		175.000.000		[illegible]		[illegible]	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	137.828.500	12	150.000.000	12	175.000.000	12	[illegible]	12	[illegible]	
2.18.0.1.2.16.0000 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.150.000		2.500.000		3.500.000		3.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	1.150.000	4	2.500.000	4	3.500.000	4	3.000.000	4	5.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Motor yang Disediakan	0	0	-	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]	1	[illegible]	
	Jumlah Unit Rumah dan Perumahan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
	Jumlah Unit Rumah dan Perumahan Dinas Gedung Kantor atau Bangunan Air Lainnya yang Disediakan	2	0		0		1		2		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		1		0		1		0		
5.18.01.2.07.0002 Pengadaan Mobil				-		-		[illegible]				[illegible]	
Tersedianya Mobil	Jumlah Paket Motor yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	[illegible]	0		1	[illegible]	
5.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		[illegible]		-		[illegible]			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		1	[illegible]	0	-	1	[illegible]	0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		80.000.000		30.000.000		45.000.000		75.000.000	
Terwujudnya Barang Dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dimiliki/Sewa	2	3	-	2	80.000.000	1	30.000.000	2	45.000.000	1	75.000.000	
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-				-		-		-	
Terwujudnya Barang dan Pemeliharaan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang dan Pemeliharaan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dimiliki/Sewa			-				-		-		-	
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				537.233.400		440.270.000		930.330.000		572.110.000		600.100.000	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	6	537.233.400	4	440.270.000	4	930.330.000	4	572.110.000	4	600.100.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Bangunan, Rumah Dinas dan Gedung yang Dimiliki/sewa	12	12		12		12		12		12		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Dimiliki	12	12		12		12		12		12		
2.15.01.1.08.0001 - Pengadaan Jasa Sewa Mengguna				-		100.000		100.000		100.000		100.000	
Terlaksananya Pengadaan Jasa Sewa Mengguna	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sewa Mengguna	3	3	-	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	
2.15.01.1.06.0002 - Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				900.000.000		250.000.000		900.000.000		900.000.000		400.000.000	
Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dimiliki	37	12	900.000.000	12	250.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000	12	400.000.000	
2.15.01.1.08.0003 - Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor				170.000.000		200.000.000		200.000.000		225.000.000		200.000.000	
Terwujudnya Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Dimiliki	12	12	170.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	12	200.000.000	
2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.040.300.000		1.002.500.000		1.000.000.000		1.500.000.000		1.125.000.000	
Terlaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dikemelihara	18	3	1.040.300.000	3	1.002.500.000	3	1.000.000.000	3	1.500.000.000	3	1.125.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dipertahankan	45	63		70		80		80		80		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah yang Dipertahankan/Dimaintenance	5	25		25		25		40		30		
	Jumlah Modul yang Dipertahankan	0	0		0		10		0		0		
	Jumlah Siswa/mur Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipertahankan dan Dibayarkan Pajak dan Retribusinya	15	40		40		47		50		55		
3.15.01.1.09.0002 - Penyelenggaraan Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pajak dan Retribusi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				715.075.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Terselenggara Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pajak dan Retribusi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipertahankan dan dibayarkan Pajak dan Retribusinya	15	40	715.075.000	40	900.000.000	47	900.000.000	50	900.000.000	50	900.000.000	
3.15.01.1.09.0003 - Pemeliharaan Mobil				-		-		5.200.000		-		-	
Terpeliharanya Pemeliharaan Mobil	Jumlah Mobil yang Dipelihara	0	4		0	-	17	5.200.000	0	-	0	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.06.01.2.06.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43	63	[illegible]	71	[illegible]	99	[illegible]	90	[illegible]	90	[illegible]	
2.06.01.2.06.0007 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	7	[illegible]	8	[illegible]	8	[illegible]	7	[illegible]	8	[illegible]	
2.06.01.2.06.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Taman dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	20	[illegible]	22	[illegible]	25	[illegible]	30	[illegible]	30	[illegible]	
2.1.2.02 PROGRAM PENYEDIAAN AIR LIMBAH DAN SANITASI DAERAH (P.L.A.S)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Meningkatnya Sanitasi Berbasis Sub Sektor	Persentase penduduk yang Sehat (%)	95,00	95,20	[illegible]	96,30	[illegible]	96,40	[illegible]	96,50	[illegible]	96,10	[illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.18.02.2.10 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				334.620.000		1.195.802.120		1.240.877.000		920.860.000		908.770.200	
Kendaraan roda 4ø	Jumlah Barang dan Pemeliharaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	1	334.620.000	15	1.195.802.120	1	1.240.877.000	12	920.860.000	11	908.770.200	
	Jumlah Dokumen Hasil Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Kendaraan Roda 4ø Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4142	4200		4000		4000		4000		4000		
	Jumlah Tenaga dan Pemeliharaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17	15		24		24		24		24		
5.18.02.2.10.0001 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				498.000		827.402.115		928.870.000		498.000		498.000	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Barang dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	1	498.000	12	827.402.115	1	928.870.000	12	498.000	12	498.000	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.02.2.06.0001 - Pegadaian Kendaraan Roda Dua Berbasis Kendaraan Bermotor				180.225.000		141.475.000		141.475.000		141.475.000		180.225.000	
Terlaksanya Kendaraan Roda Dua Berbasis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Roda Dua Berbasis Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4142	4200	180.225.000	4000	141.475.000	4000	141.475.000	4000	141.475.000	4000	180.225.000	
2.18.02.2.09.0002 - Penyediaan Buku Leter Uji Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor				210.600.000		125.640.000		125.640.000		125.640.000		125.640.000	
Tersediaanya Buku Leter Uji Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Buku Leter Uji Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor	2	2	210.600.000	2	125.640.000	2	125.640.000	2	125.640.000	2	125.640.000	
2.18.02.2.10.0003 - Penyiaran Dialog dan Pemasaran Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor				96.297.000		96.297.000		96.297.000		96.297.000		96.297.000	
Terselenggaranya Siaran dan Pemasaran Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor	Jumlah Siaran dan Pemasaran Pengujian Berbasis Kendaraan Bermotor yang Terpublikasi	77	72	96.297.000	24	96.297.000	24	96.297.000	24	96.297.000	24	96.297.000	
Meningkatnya kemakmuran penggawa (aber kan angkutan	Persentase penanggawa (ab. kenaa angkutan jalan yang terbantu/ fasilitasi	100	100	767.075.000	100	767.075.000	100	767.075.000	100	767.075.000	100	767.075.000	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.19.02.2.06 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Dokumen monitoring dan evaluasi lalu lintas jaringan jalan Kabupaten/kota	Jumlah laporan Pusat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2	4	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	
	Jumlah Laporan Pengaturan dan Pengendalian Elektronik Pelaksanaan Kabupaten untuk Jalan Kabupaten/ Kota	12	20		20		20		20		20		
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1	8		9		9		9		9		
2.19.02.2.06.10.02 Pengaturan dan Pengendalian Elektronik Pelaksanaan Kabupaten untuk Jalan Kabupaten/Kota				740.340.000		740.340.000		740.340.000		740.340.000		740.340.000	
Terlaksanaya dan Terbendalaya Elektronik Pelaksanaan Kabupaten untuk	Jumlah Laporan Pengaturan dan Pengendalian	12	20	740.340.000	20	740.340.000	20	740.340.000	20	740.340.000	20	740.340.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jalan Kabupaten/ Kota												
2.16.02.2.06.0010 - Pemeliharaan Rutin/berkala Waswas dan Perbaikan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				23.080.000		23.080.000		23.080.000		23.080.000		23.080.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Waswas dan Perbaikan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/berkala Waswas dan Perbaikan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1	6	23.080.000	9	23.080.000	9	23.080.000	9	23.080.000	9	23.080.000	
2.16.02.2.06.0020 - Penata Lalu Lintas dan Pengkajian Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3.648.000		3.648.000		3.648.000		3.648.000		3.648.000	
Terlaksananya Penata Lalu Lintas dan Kajian Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penata Lalu Lintas dan kajian Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2	5	3.648.000	2	3.648.000	2	3.648.000	2	3.648.000	2	3.648.000	
Meningkatnya kewaspadaan Jembatan terhadap dan ancaman bahaya sekitar	Pemeriksaan konstruksi Jembatan berbentuk rangka dan busur	65,44	98,54	140.724.000	67,54	104.240.000	98,44	102.240.000	98,44	102.240.000	98,44	170.114.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.02.2.02 - Pengadaan Terminal Penumpang Tipe C				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe C Baturiti	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terfasilitasi dan tersediakan	2	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	
	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	1		0		1		1		1		
2.18.02.2.03-00.000 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000	
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	1	5.400.000	0	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	
2.18.02.2.04-00.000 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				2.214.000		2.214.000		2.214.000		2.214.000		2.214.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselesaikan Rehabilitasi dan Revitalisasi Terminal Tipe C (Pendidikan Dinas dan Pariwisata)	Jumlah Terminal Tipe C (Pendidikan Dinas dan Pariwisata) yang terrehabilitasi dan terpelihara	3	3	5.214.000	3	5.214.000	3	5.214.000	3	5.214.000	3	5.214.000	
5.15.02.2.06 - Pengadaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				125.980.000		126.620.000		126.620.000		126.620.000		127.000.000	
Lebaran Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	7	125.980.000	7	126.620.000	8	126.620.000	8	126.620.000	8	127.000.000	
5.15.02.2.06.0002 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				125.980.000		126.620.000		126.620.000		126.620.000		127.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	1	7	125.980.000	7	126.620.000	8	126.620.000	8	126.620.000	8	127.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia												
3.18.10.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.150.000		57.000.000		30.250.000		44.000.000		42.000.000	
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kerja Harian Izin Rekomendasi Penggunaan Prasarana Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	13	12	4.150.000	12	57.000.000	12	30.250.000	12	44.000.000	12	42.000.000	
	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pemeliharaan Perlengkapan Prasarana Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Bentuk Pelaporan Pertimbangan Berkaitan Dengan Pengajuan Electronic	2	1		12		12		12		12		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
[illegible] - Kesehatan dan Rehabilitasi Penggunaan Pelestarian dan Pemeliharaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terlaksananya Kesehatan dan Rehabilitasi Penggunaan Pelestarian dan Pemeliharaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kesehatan dan Rehabilitasi Penggunaan Pelestarian dan Pemeliharaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	
[illegible] - Pengadaan Pemasangan Perawatan dan Pengawasan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Bentuk Pelaksanaan Pemasangan Perawatan Tanda Elektronik				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terlaksananya Pelaksanaan Pemasangan Perawatan dan Pengawasan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasangan Perawatan dan Pengawasan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Angkutan Orang dalam	8	1	[illegible]	14	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	12	[illegible]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kabupaten/Kota dalam Daerah Pelajaran Nasional Berjumlah Tenaganya, Jenis Kelamnya	Jumlah Kecelakaan Kabupaten/ Kota dalam Daerah Pelajaran nasional Berjumlah Tenaganya Berat's Diklasifikasi												
Meninggalnya keterampilan perlengkapan jalan dari pengerjaan	Pekerjaan keterampilan perlengkapan jalan dan pengerjaan	45,21	35,20	14 [illegible]	50,30	13 [illegible]	52,73	15 [illegible]	53,41	14 [illegible]	54,26	14 [illegible]	
2.15.2.2.02 Pengerjaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				15 [illegible]		13 [illegible]		13 [illegible]		14 [illegible]		14 [illegible]	
Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	203	325	13 [illegible]	1142	12 [illegible]	1344	13 [illegible]	1339	14 [illegible]	1328	14 [illegible]	
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terdistribusi dan Terpasang	183	4		250		300		260		400		
	Jumlah Pemasang Jalan yang Terdistribusi dan Terpasang	-	5		250		481		280		297		
	Jumlah Pemasang Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta yang Berhasil	-	62		313		313		317		203		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.19.02.2.02.0101 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	42	[illegible]	212	[illegible]	212	[illegible]	212	[illegible]	212	[illegible]	
2.19.02.2.02.0102 - Peningkatan Perlinggungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				472.288.000		472.288.000		472.288.000		472.288.000		472.288.000	
Terwujudnya Perlinggungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlinggungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terwujud	200	21	472.288.000	1142	472.288.000	1144	472.288.000	1138	472.288.000	1138	472.288.000	
2.19.02.2.02.0103 - Rehabilitasi Rutin Pemeliharaan Prasarana Jalan				206.128.000		206.128.000		206.128.000		206.128.000		206.128.000	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	-	2	206.128.000	281	206.128.000	281	206.128.000	281	206.128.000	281	206.128.000	
2.19.02.2.02.0104 - Rehabilitasi Rutin Pemeliharaan Perlinggungan Jalan				196.320.000		196.320.000		196.320.000		196.320.000		196.320.000	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlinggungan Jalan	Jumlah Perlinggungan Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	183	4	196.320.000	800	196.320.000	800	196.320.000	800	196.320.000	800	196.320.000	
2.19.02.2.04 - Penertiban Lalu Perlinggungan dan Pembangunan Pasilitas Parkir				984.467.000		950.500.000		925.500.000		147.000.000		130.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jasa pemeliharaan dan bantuan parkir	Jumlah Sistem Informasi Pengawasan dan Pendataan dan Penyelenggaraan dan Terlaksananya Pendidikan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan dan Pemungutan Retribusi Tertinggal Secara Elektronik	14	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	147.800.000	[illegible]	[illegible]	
JUMLAH (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		147.800.000		[illegible]	
Terlaksananya Pemenuhan Pengawasan Pendataan dan dan Penyelenggaraan dan Terlaksananya Pendidikan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Dan Pemungutan Retribusi Tertinggal Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Pendataan dan Penyelenggaraan dan dan Terlaksananya Pendidikan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Pemungutan Retribusi Tertinggal Secara Elektronik	14	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	147.800.000	[illegible]	[illegible]	

4.3 Sub Kegiatan Dinas Perhubungan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029 ditambah rencana tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yang akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2030. Periode Renstra tahun 2025-2029 terdiri dari 16 kegiatan, dijabarkan kedalam 60 sub kegiatan dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang disusun untuk lima tahun ke depan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan, sebagaimana tercantum pada tabel 4.2

4.4 Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel 4.3

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
1.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Terwujudnya Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan dan Kaliparang	
			1.03.13.5.02.0003 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Gunung Sewu	
			1.03.13.5.02.0015 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sululingu	
			1.03.13.5.02.0018 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	
2.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas terminal dan angkutan bus selatan	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			2.15.02.2.03.0008 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
		Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan dan perpakiran	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		Meningkatnya kendaraan bermotor laik jalan	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Barang dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Dokid Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0005 - Pemeliharaan Barang dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Meningkatnya keselamatan pengguna jalan dan angkutan	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0014 - Evaluasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas terminal dan angkutan lintas sekolah	2.15.02.2.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETE-RANGAN
			2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Rekomendasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Penumuhan Persyaratan Perizinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU)

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan menetapkan satu Tujuan PD dengan satu indikator tujuan serta satu Sasaran PD dengan satu indikator sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan selama periode tahun 2026-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan									
2.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,39	0,59	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	
3.	Indeks layanan transportasi	Indeks	61,14	74,54	75,03	75,98	76,97	77,37	78,24	

4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 tetap mengacu pada prinsip perencanaan berbasis kinerja. Salah satu unsur penting dalam

pendekatan ini adalah penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian terhadap tujuan strategis organisasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk menentukan target penyelenggaraan urusan. Indikator Kinerja Kunci selama periode tahun 2026-2029 terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 – URUSAN PENGEND-ALIAN INTANSI PERHUBU-NGAN										
2.	Rasio konektivi-tas kabupaten /kota	positif	%	0,55	0,56	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	
3.	Kinerja lalu lintas Kabupaten / Kota		%	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2029 memuat kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan yang berisi strategis untuk dijadikan acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan RENSTRA dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan (Renja PD).

KEPALA,

BAGAS JATMIKO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARIYANTA

METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASE-LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks layanan transportasi	Indeks	Indeks layanan transportasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dan kualitas layanan transportasi yang dipersepsi dari kemampuan pemenuhan capaian kegiatan yang di-laksanakan oleh Dinas Perhubungan	=(Persentase pelanggaran yang berhasil ditindak x 15%)+(Persentase tingkat kelancaran perjalan angkutan umum x 15%)+(Persen-tase keselamatan lindkan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C x 20%)+(Persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan x 20%)+(Persentase kendaraan yang melakukan uji kik jalan x 30%)	Semakin tinggi nilai indeks maka semakin baik kinerja dan kualitas layanan transportasi berpada pelanggan	Hidang Lalu lintas, Hidang LLJ dan Perjalanan, Hidang Angkutan dan Terminal, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	61.28	74.54	75.85	75.98	76.87	77.07	78.24	
XXXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI													
AA	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
1	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	%	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota, menggambar tingkat konektivitas pering-at transportasi darat di wilayah kewenangan kabupaten/kota	jumlah ruas yang dilayani x 100% jumlah/jumlah keseluruhan ruas	Semakin tinggi rasionya semakin baik konektivitas Kabupaten, semua Ver. muslah ulang dilitas dan tanda lintas penduduk dan barang	Hidang Angkutan dan Terminal	0.36	0.39	0.38	0.00	0.61	0.62	0.63	
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	%	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota melalui survey di ruas jalan kabupaten yang menjadi sampel. Nilai pengukuran kinerja lalu lintas (V/C ratio) pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota	nilai rata V/C ratio ruas-ruas jalan kabupaten yang menjadi sampel pengukuran	Kondisi lalu lintas di suatu wilayah Kabupaten, semakin tinggi kinerja lalu lintas dapat menyebabkan kemacetan jika Kapasitas jalan sudah mencukupi	Hasil survey di jalan Kabupaten yang menjadi sampel	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

OPD: DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE 2019	TARGET						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEBERMUKIMAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG													
Terselenggara Pemasangan LLAJ di Kawasan Strategis	Persentase penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di kawasan strategis (%)	Mengukur kawasan strategis prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan strategis Kota Gunung sewu, Sekaliurang dan Pantai Selatan Gunungkidul	=Luas terfasilitasi fasilitasi kajian kelayakan prasarana lalu lintas/prasarana lalu lintas dan angkutan jalan/ luas lintas hasil kajian	Sumber: Surat permohonan/ketersediaan prasarana lalu lintas di kawasan strategis Kota Gunungsewu, Sekaliurang dan Pantai Selatan Gunungkidul	Dishub Lalu Lintas, Dishub PJU dan Perpa/Kimar	25	30	35	65	75	85	100	2.15.0.00.0.00.01 .0000 - Dinas Perhubungan
3.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
Meningkatnya Kendaraan Bermotor laik jalan	Persentase kendaraan yang lulus uji (%)	Mengukur jumlah kendaraan yang memenuhi syarat/lulus uji laik jalan	=(jumlah kendaraan yang lulus uji/jumlah kendaraan yang melakukan uji) x 100	Sumber: Dinas menunjukkan semakin banyak kendaraan yang laik jalan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	90	90,04	90,2	90,35	90,45	90,50	90,55	2.15.0.00.0.00.13 .0000 - Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kesalamatan pengguna jalan dan angkutan	Persentase penanganan titik lintas angkutan jalan yang berhasil ditindak (%)	Mengukur tingkat penanganan titik lintas dan angkutan jalan yang ditindak	=(jumlah penanganan yang berhasil ditindak/jumlah penanganan dalam operasi)x100	Semakin tinggi menunjukkan semakin baik penanganan penanganan titik lintas dan angkutan jalan dalam operasi (%)	Dishub Lalu Lintas Dinas Perhubungan	100	100	100	100	100	100	100	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketersediaan fasilitas terminal dan angkutan kota sekolah	Persentase ketersediaan fasilitas terminal tipe C dan bus sekolah (%)	Mengukur seberapa lengkap dan berfungsi fasilitas fasilitas yang ada di terminal tipe C sesuai dengan standar yang berlaku	=(jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia)/(Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan) X 100(b)+(Jumlah ketersediaan fasilitas bus sekolah/jumlah kesesuaian 100)) /2	Semakin tinggi angka menunjukan ketersediaan terminal tipe C dan bus sekolah menunjukan ketersediaan fasilitas terminal yang baik dan tersedia	Bidang Angkutan dan Terminal	65,44	63,44	66,44	67,44	68,44	69,44	69,44	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran (%)	Mengukur ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran sesuai dengan kebutuhan	= (jumlah fasilitas dan perlengkapan jalan terpasang/jumlah kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan) x 100	Semakin tinggi angka menunjukan ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran yang ideal sesuai standar yang ditetapkan	Bidang lalu lintas, PJU dan Perparkiran	46,61	49,09	50	50,92	52,77	53,44	54,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan